

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran politik memadukan dua makna, yakni "kesadaran" yang merepresentasikan keadaan tahu, paham, dan peka terhadap suatu fenomena, serta "politik" yang berorientasi pada upaya mewujudkan tatanan hidup yang ideal. Oleh sebab itu, kesadaran politik merefleksikan proses kognitif dan afektif seseorang mengenai cara-cara mencapai tujuan bersama tersebut. Surbakti (1992) menegaskan bahwa kesadaran politik berakar pada pengenalan hak dan kewajiban warga negara, di mana hal ini ditunjukkan melalui luasnya pengetahuan politik serta tingginya atensi individu terhadap lingkungan sosialnya.

Pemahaman mengenai negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta cara mewujudkan tujuan bersama merupakan esensi dasar dari kesadaran politik. Budiarjo (2010) mendefinisikan kesadaran politik sebagai akumulasi dari pengetahuan, antusiasme, serta perhatian individu terhadap realitas masyarakat dan kondisi politik yang tengah terjadi. Dalam kehidupan demokrasi, masyarakat idealnya memiliki kesadaran politik yang baik agar mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran tersebut tidak berhenti pada mengetahui informasi politik, tetapi berkembang menjadi pemahaman, sikap, dan tindakan.

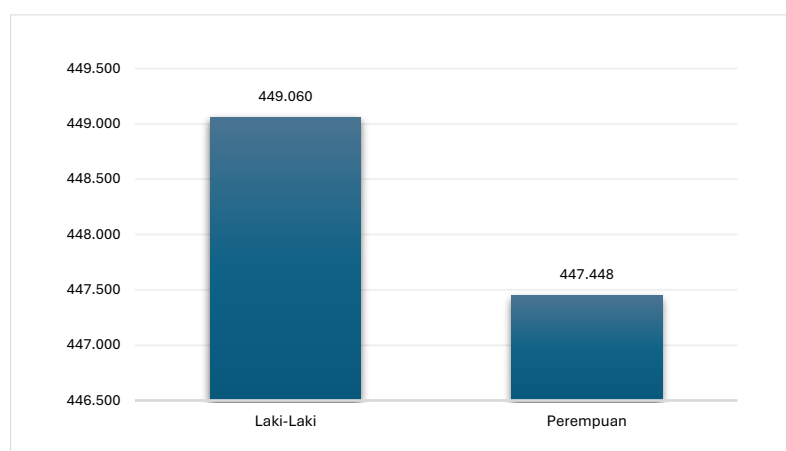
Kesadaran politik memiliki keterkaitan erat dengan pemahaman masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Menurut Miriam Budiardjo (2010) perasaan seseorang berada dalam sistem pemerintahan serta memiliki keyakinan bahwa dirinya dapat sedikit banyak memengaruhi pemegang kekuasaan atau memiliki efek politik (*political efficacy*). Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran politik berkaitan dengan bagaimana masyarakat paham posisinya sebagai warga negara serta menyadari adanya peran yang dapat dilakukan dalam proses politik.

Kesadaran politik akan berkembang ketika masyarakat memiliki perhatian dan keterlibatan terhadap aktivitas politik yang terjadi di sekitarnya. Kesadaran politik juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memahami kebijakan publik serta melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Soekanto (1982), kesadaran terdiri atas empat indikator, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan Pola perilaku (tindakan) sebagai tahapan yang menunjukkan perkembangan kesadaran individu terhadap kehidupan politik. Pengetahuan berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui sistem dan proses politik yang berlangsung. Pemahaman menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memaknai proses politik tersebut. Sikap mencerminkan bagaimana masyarakat menilai fenomena politik yang terjadi, sedangkan tindakan merupakan bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik.

Dalam pemilihan umum, pengetahuan dan pemahaman politik menjadi penting agar masyarakat mampu mengenali berbagai isu politik dan memahami arti penggunaan hak pilih sebagai bagian dari hak warga negara. Selain itu, sikap dan tindakan politik juga menjadi aspek yang menentukan kualitas keterlibatan masyarakat dalam pemilu karena mencerminkan tanggung jawab warga negara dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran politik yang baik cenderung menunjukkan keterlibatan politik yang lebih aktif.

Saat pemilu contoh kesadaran politik ialah masyarakat yang tidak hanya melaksanakan kehadiran secara administratif, tetapi juga bergerak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan politik yang dimiliki. Kesadaran politik yang baik dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara lebih rasional dan sesuai dengan tujuan politik yang ingin dicapai (Apriyani, 2024). Oleh karena itu, terdapat kesadaran politik berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum. Namun, kenaikan angka partisipasi tersebut tidak serta-merta mencerminkan penguatan keterlibatan politik masyarakat secara kualitatif. Sejumlah kajian mencatat adanya kecenderungan polarisasi politik menjelang Pemilu 2024 yang berpotensi memengaruhi motif dan kualitas partisipasi warga (Al-Hamdi, 2023).

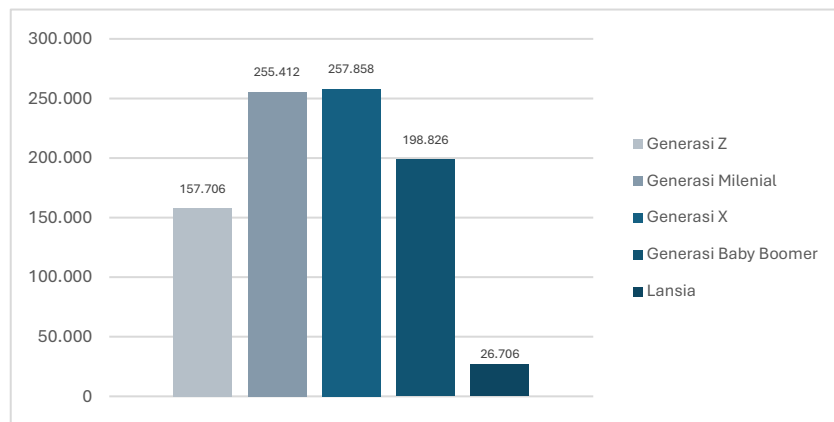
Sebagai gambaran nyata dari dinamika tersebut, pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sumedang menyajikan kondisi realitas di lapangan yang sangat relevan. Daerah ini tercatat memiliki jumlah pemilih yang besar dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Besarnya jumlah pemilih dan keberagaman karakteristik masyarakat menjadikan Kabupaten Sumedang relevan sebagai lokasi penelitian mengenai tingkat kesadaran politik masyarakat pada Pemilu Tahun 2024. Besarnya potensi pemilih di wilayah ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Rekapitulasi DPT Kabupaten Sumedang Tahun 2024

(Sumber: Berita Acara Pleno KPU Sumedang 2023 diolah oleh penulis)

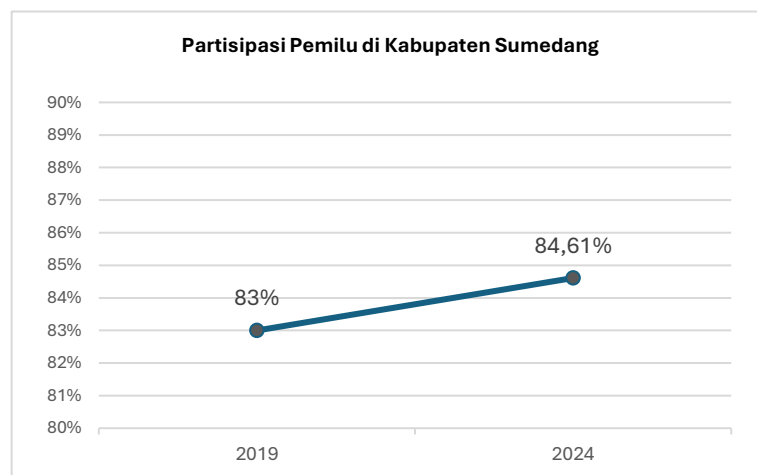
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang melalui Berita Acara Pleno jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024 mencapai 896.508 pemilih yang terdiri atas 449.060 pemilih laki-laki dan 447.448 pemilih perempuan. Jumlah tersebut tersebar pada 26 kecamatan, 277 desa/kelurahan, dan 3.657 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Besarnya jumlah pemilih tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang menjadi salah satu wilayah menunjukkan cakupan populasi penelitian yang besar dan melibatkan kelompok masyarakat dengan latar belakang yang beragam.



Gambar 1. 2 Jumlah Pemilih Kabupaten Sumedang Menurut Generasi pada Pemilu 2024

(Sumber: Berita Acara Pleno KPU Sumedang 2023 diolah oleh penulis)

Selain dilihat dari jumlah pemilih, karakteristik pemilih di Kabupaten Sumedang juga dapat dilihat berdasarkan kelompok generasi. Berdasarkan data KPU Kabupaten Sumedang, pemilih pada Pemilu Tahun 2024 didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu Generasi X sebesar sekitar 29%, generasi milenial sebesar 28%, baby boomer sebesar 22%, generasi Z sebesar 18%, dan lansia sekitar 3%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pemilih berada pada kelompok usia yang memiliki pola akses informasi dan pengalaman sosial yang beragam sehingga dapat memengaruhi cara mereka memahami dan merespons proses politik.



Gambar 1. 3 Tingkat Partisipasi Pemilu Kabupaten Sumedang

(Sumber: sumedangkab.go.id 2024 data diolah oleh penulis)

Gambaran keterlibatan masyarakat dalam pemilu juga dapat dilihat melalui tingkat partisipasi pemilih pada dua periode pemilu terakhir. Berdasarkan data yang diolah dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2019 tercatat sebesar 83%, kemudian meningkat menjadi 84,61% pada Pemilu Tahun 2024. Dengan demikian, persentase masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilu Tahun 2024 sebesar 15,39%. Namun, angka partisipasi tersebut belum memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran politik masyarakat.

Meskipun tingkat partisipasi pemilih menunjukkan angka yang tinggi, data tersebut belum memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran politik masyarakat Kabupaten Sumedang. Tingginya kehadiran pemilih di TPS tidak dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan politik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menggambarkan tingkat kesadaran politik masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.



Gambar 1. 4 KPU Kabupaten Sumedang Sosialisasikan Pemilu dan Pilkada 2024

(Sumber: KPU Kabupaten Sumedang 2022)

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilu, KPU Kabupaten Sumedang juga melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi pemilih menjelang Pemilu Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperluas informasi mengenai pelaksanaan pemilu dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Adanya upaya tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan pemilu.

Kesadaran politik telah banyak dikaji dan dilakukan dalam penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kesadaran politik memiliki keterkaitan pada kegiatan politik. Penelitian yang dilakukan oleh Tasha Lutfhi Ainy (2022) mengenai pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik pemilih Kota Padang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat dipengaruhi oleh budaya politik yang kemudian berdampak terhadap tingkat partisipasi pemilih, Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran politik menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan keputusan masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam pemilu.

Pengaruh tingkat kesadaran politik terhadap partisipasi politik juga diteliti oleh Lila Nurbaiti (2019) pada pemilih pemula pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018. Penelitian tersebut dengan teori kesadaran politik dari Gabriel Almond melalui indikator kesadaran input, kesadaran output, penerimaan informasi, dan pemberian opini dan teori partisipasi politik dari Kaase dan Marsh. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran politik memberikan pengaruh positif terhadap partisipasi politik pemilih pemula.

Perbedaan pada lokasi, objek, periode pemilu, serta indikator penelitian pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar berfokus pada kontestasi politik di tingkat daerah, seperti pemilihan gubernur maupun pemilihan kepala daerah, dengan kerangka teori kesadaran politik yang umumnya merujuk pada pendekatan Almond dan Verba atau model kesadaran input-output-opini. Dari penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang mengkaji tingkat kesadaran politik pada konteks Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan cakupan wilayah setingkat kabupaten secara utuh, maupun yang menggunakan kerangka kesadaran politik berjenjang dari Soekanto, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan) politik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh kesadaran politik masyarakat Kabupaten Sumedang pada Pemilu Tahun 2024 serta memberikan gambaran mengenai keterkaitan tingkat kesadaran politik dengan keterlibatan masyarakat dalam pemilu.

Melihat kondisi tersebut, tingkat kesadaran politik masyarakat Kabupaten Sumedang pada Pemilu Tahun 2024 penting untuk dikaji secara lebih terperinci. Pengukuran melalui pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan dapat memberikan gambaran mengenai aspek kesadaran politik yang telah berkembang dengan baik maupun aspek yang masih menunjukkan capaian lebih rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tingkat Kesadaran Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sumedang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah, Bagaimana tingkat kesadaran politik masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran politik masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik untuk akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Akademik

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik, khususnya kajian mengenai kesadaran politik masyarakat. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur mengenai tingkat kesadaran politik berdasarkan aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kesadaran politik pada konteks pemilu atau wilayah yang berbeda.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran politik masyarakat Kabupaten Sumedang pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Hasil penelitian dapat menjadi bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam memahami kondisi kesadaran politik masyarakat, terutama pada aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan politik.

E. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan Pemilihan Umum tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hak pilih, tetapi juga dengan kesiapan masyarakat dalam memahami dan merespons proses politik yang berlangsung. Salah satu aspek yang penting untuk melihat kesiapan tersebut adalah kesadaran politik. Kesadaran politik menunjukkan sejauh

mana masyarakat mengetahui informasi politik, memahami makna dan proses politik, memiliki sikap terhadap persoalan politik, serta mampu mewujudkan pengetahuan dan sikap tersebut dalam tindakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang menempatkan kesadaran politik sebagai satu-satunya variabel yang dikaji untuk menggambarkan kondisi kesadaran politik masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sumedang.

Pengukuran kesadaran politik dalam penelitian ini menggunakan teori Soekanto yang terdiri atas empat dimensi, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku atau tindakan. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk melihat kesadaran politik secara bertahap. Pengetahuan merupakan tahap awal yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengetahui informasi mengenai kehidupan politik dan penyelenggaraan pemilu, seperti hak pilih, jadwal pemungutan suara, tata cara memilih, serta informasi mengenai peserta pemilu. Pengetahuan tersebut kemudian berkembang menjadi pemahaman, yaitu kemampuan masyarakat dalam memaknai informasi politik yang diterima serta memahami tujuan, fungsi, dan pentingnya pemilu dalam kehidupan demokrasi.

Pemahaman yang dimiliki masyarakat selanjutnya tercermin dalam sikap politik. Sikap menunjukkan bagaimana masyarakat memberikan penilaian, menerima, atau merespons berbagai keadaan dan proses politik yang dihadapi. Sikap dapat terlihat dari pandangan masyarakat terhadap pentingnya pemilu, penggunaan hak pilih, penyelenggaraan pemilu, maupun berbagai persoalan politik yang berkembang. Tahap selanjutnya adalah pola perilaku atau tindakan politik, yaitu bentuk nyata dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap yang telah terbentuk. Tindakan menunjukkan sejauh mana masyarakat mampu menerapkan kesadaran politiknya dalam perilaku nyata, baik dalam menggunakan hak politik maupun dalam mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan politik.



Gambar 1. 5 Kerangka Berpikir

Dari keseluruhan kerangka pemikiran di atas keempat dimensi tersebut menjadi dasar untuk menggambarkan tingkat kesadaran politik masyarakat Kabupaten Sumedang pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Setiap dimensi dianalisis untuk melihat capaian masing-masing serta mengetahui perbedaan tingkat kesadaran pada setiap tahap. Hasil dari penilaian terhadap pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan kemudian digunakan untuk menentukan tingkat kesadaran politik masyarakat secara keseluruhan. Kerangka berpikir penelitian ini mengarahkan analisis dari pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan menuju gambaran tingkat kesadaran politik masyarakat Kabupaten Sumedang pada Pemilu Tahun 2024.